

BAB V

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini, penulis berusaha memaparkan bagaimana efektivitas sebuah Agreement on Comfort Women dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan yang telah lama mengalami pasang surut akibat perseteruan historis. Penelitian ini menggunakan konsep Perjanjian Internasional, Kepatuhan (Compliance) dan Kepentingan Nasional untuk meneliti seberapa efektif perjanjian ini kemudian dapat memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan yang di nilai dari tingkat kepatuhan Jepang dan Korea Selatan terhadap perjanjian ini. Seperti yang sudah dipaparkan dalam tulisannya bertajuk *On Compliance*, Abram Chayes dan Antonia Handler Chayes memaparkan bahwa tingkatan kepatuhan tidak mempunyai ukuran yang jelas. Tindakan patuh atau tidak kemudian akan bergantung pada bagaimana Kepentingan Nasional dapat terakomodir dengan baik dalam perjanjian yang diikuti. Jika kepentingan nasional dapat terakomodir dengan baik, maka kemudian negara akan patuh pada perjanjian tersebut dan kemudian penerapannya akan menjadi lebih efektif, dan begitupun sebaliknya.

Agreement on Comfort Women ini sendiri adalah sebuah langkah maju bagi Jepang dan Korea Selatan dalam menyelesaikan perseteruan historis diantar keduanya. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang “Final and Irreversibly”, yang berarti bahwa perjanjian ini merupakan perjanjian final dan tidak dapat dipulihkan lagi. Hal ini menjadi usaha bagi keduanya agar permasalahan ini tidak mencuat kepermukaan di kemudian hari. Perjanjian ini memuat beberapa hal penting yang menjadi tuntutan bagi para korban, pertama adalah permintaan maaf, perjanjian ini memuat permintaan maaf dari Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe terkait apa yang dilakukan Jepang di masa lalu. Permintaan

maaf ini secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa Jepang mengakui keterlibatannya dalam pengorganisasian jugun ianfu. kedua adalah mengenai pemberian kompensasi terhadap para korban kebijakan perbudakan seksual. Jepang memberikan kompensasi sebesar 1 Milyar Yen, atau setara 8,3 Juta US Dolar kepada para jugun ianfu Korea Selatan. namun pemberian kompensasi ini tidak langsung melalui pemerintahan Jepang, namun melalui lembaga yang di bentuk oleh pemerintah Korea Selatan yang secara khusus nantinya mendistribusikan kompensasi dan permintaan maaf kepada para jugun ianfu.

Selain itu, Jepang meminta kepada Korea Selatan untuk memindahkan patung jugun ianfu yang berada di Kedutaan Besar Jepang sebagai syarat kelancaran perjanjian ini. Patung jugun ianfu telah lama menjadi perhatian pemerintah Jepang. Patung ini dibangun tahun 2011 oleh aktivis sebagai wujud desakan untuk pemerintah Jepang untuk sesegera mungkin meminta maaf dan memberikan kompensasi yang setimpal dan tuntutan tuntutan lainnya. Pendirian patung jugun ianfu ini melukai martabat Jepang, selain itu pembiaran terhadap patung ini dianggap sebagai penolakan Korea Selatan untuk berdamai.

Terwujudnya perjanjian ini di antara Jepang dan Korea Selatan menimbulkan kontra, khususnya di Korea Selatan. kalangan masyarakat dan aktivis menilai bahwa perjanjian ini hanyalah perjanjian yang bersifat politis bukan untuk kepentingan para jugun ianfu. mereka menganggap pemerintah telah gagal dalam memenuhi tuntutan para jugun ianfu terutama terkait pengakuan terkait sistem perbudakan seks yang melibatkan jugun Ianfu. pemerintah Jepang memang telah mengakui keterlibatannya dalam sistem tersebut. Namun tidak ada langkah kongkrit untuk mengakui keterlibatan tersebut seperti memasukan jugun ianfu sebagai bagian dari perundang undangan atau bahkan memasukan sejarah jugun ianfu sebagai bagian dari kurikulum sejarah. Selain itu, para jugun ianfu sendiri tidak sama sekali dilibatkan dalam tercapainya

perjanjian tersebut. hal ini semakin meyakinkan bahwa perjanjian ini hanya untuk tujuan tujuan politik kedua negara.

Sikap Jepang pasca perjanjian ini juga membingungkan banyak kalangan. Hal ini dikarenakan pasca dua bulan perjanjian ini di teken kedua negara. Jepang justru mengirimkan dokumen terkait penolakannya terhadap sikap koersif pada perekrutan Jugun Ianfu. hal ini tentu sangat membingungkan karena Jepang baru saja menekan kesepakatan untuk mengakhiri perdebatan terkait Jugun Ianfu. selain itu, sikap Jepang ini bertentangan dengan fakta yang ada dalam pengadilan kejahatan perang terhadap perempuan pada tahun 1999-2001. Fakta tersebut berkaitan dengan keterlibatan para petinggi pemerintah dalam sistem perbudakan seks ini dan terkait perekrutan paksa para jugun ianfu.

Permasalahan patung jugun ianfu semakin merenggangkan hubungan Jepang dan Korea Selatan. Jepang menuntut Korea Selatan untuk sesegera mungkin memindahkan patung jugun ianfu dari Kedutaan Besar Jepang di Seoul. Permintaan ini kemudian tidak bisa dituruti oleh pemerintah Korea Selatan karena permasalahan patung tersebut diluar kuasa pemerintah. Kemarahan Jepang semakin menjadi jadi ketika Konsulat Jendral Jepang di Busan mejadi sasaran pemasangan patung jugun ianfu oleh para aktivis yang menolak Agreement on Comfort Women. Buntut dari itu, Jepang kemudian menarik duta besarnya pada 6 Januari 2017 sebagai bentuk protes. Selain itu, Jepang juga menunda pembicaraan ekonomi tingkat tinggi dan kerjasama currency swap antara kedua negara. Korea Selatan menyayangkan sikap Jepang yang menunda kerjasama hanya karena permasalahan politik. Namun selang 3 bulan, Jepang mengembalikan Duta Besarnya ke Korea Selatan guna memantau situasi politik di Korea Selatan pasca pemakzulan Park Geun Hye. Penarikan Duta Besar menjadi bukti bahwa Agreement on Comfort Women menjadi tidak terlalu cukup efektif dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan. Agreement on Comfort Women gagal untuk meredam kembali konflik konflik histori di antara keduanya.

Permasalahan Jugun Ianfu terus bergulir bahkan pasca Korea Selatan memiliki Presiden baru. Moon Jae In selaku Presiden Korea Selatan yang baru langsung menolak adanya Agreement on Comfort Women, penolakan itu disampaikan setelah ia menerima banyak penolakan terkait perjanjian ini dalam masyarakat. Penolakan oleh Moon Jae In ini diikuti oleh wacana pemerintah untuk meninjau ulang, peninjauan ulang ini direspon Jepang, pemerintah Jepang menyayangkan sikap Korea Selatan dan menyatakan peninjauan ulang akan membuat hubungan keduanya semakin kacau. Wacana peninjauan ulang ini tak bertahan lama karena pemerintah Korea Selatan tidak bisa mengelak bahwa pemerintah sebelumnya telah setuju bahwa permasalahan Jugun Ianfu telah selesai. Namun, pemerintah Korea Selatan tetap meminta Jepang untuk memberi tindakan tindakan lebih untuk mengembalikan martabat jugun ianfu.

Wacana peninjauan kembali Agreement on Comfort Women semakin membuktikan bahwa perjanjian ini kurang efektif dalam memperbaiki hubungan Jepang dan Korea Selatan. perjanjian ini gagal berorientasi korban sesuai dengan standar penyelesaian konflik hak asasi manusia. Jugun ianfu memang menerima kompensasi dan permintaan maaf dari pemerintah Jepang. Namun bentuk permintaan maaf dirasa tidak terlalu tulus. Bentuk kompensasi dan permintaan maaf ini juga tidak ada bedanya dengan yang diberikan oleh AWF pada tahun 1995. Selain itu, tidak ada langkah yang lebih legal untuk mengakui sistem perbudakan ini. Padahal salah satu tuntutan jugun ianfu adalah jugun ianfu harus masuk kedalam sistem perundang undangan Jepang dan kurikulum sejarah agar masyarakat paham dengan sejarah Jugun Ianfu.